



LAPORAN

KOMISI A DPRD KOTA DEPOK

PENYAMPAIAN LAPORAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PERUBAHAN TAHUN 2023



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, shalawat teriring salam semoga selalu tercurah atas tauladan terbaik kita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam.

Yang kami hormati:

- ∞ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
- ∞ Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok
- ∞ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah (FORKOPIMDA) Kota Depok
- ∞ Sekretaris Daerah beserta para Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- ∞ Para Pejabat Sipil, TNI-POLRI di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- ∞ Pejabat Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- ∞ Rekan – Rekan Pers dan Media;
- ∞ Bapak, Ibu dan Hadirin serta Semua Undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

Pada Tanggal 5, 6 dan 7 Juni 2023 Komisi A DPRD Kota Depok bersama Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi A telah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut Komisi A antara lain membahas pokok-pokok pikiran Perubahan DPRD Kota Depok yang merupakan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses masa sidang ke 2 untuk kemudian diselaraskan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Perubahan Tahun 2023. Adapun poin-poin yang dihasilkan terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Depok

- a. dilakukan penyesuaian usulan formasi CPNS sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. memaksimalkan perangkat elektronik yang mampu menunjang pelaksanaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di Kota Depok;
- c. disusun indikator minimal yang dapat diakses oleh masyarakat terhadap penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di Kota Depok;
- d. dibentuk sistem Manajemen talenta di Pemerintah Kota Depok untuk memetakan potensi kepemimpinan di setiap SKPD dan Unit-Unit Kerja Daerah lainnya.

2. Inspektorat Daerah Kota Depok

- a. dilakukan pengetatan pengawasan khususnya terhadap ASN yang terlibat dalam politik praktis (khususnya menjelang masa Pemilu yang akan datang);
- b. dirumuskan mekanisme pengawasan sehingga dapat optimal;
- c. dibentuk sistem manajemen pengawasan yang berbasis digital dengan pemanfaatan teknologi informasi.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok

- a. dilakukan penguatan dan optimalisasi kegiatan pendidikan politik untuk pemilih pemula yang dalam pelaksanaannya agar melibatkan anggota DPRD Kota Depok;
- b. dilakukan inovasi dalam mendorong partisipasi pemilih pemula.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

- a. melakukan komunikasi insentif dan pelimpahan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Kota Depok;
- b. dilakukan penertiban terhadap setiap bangunan yang telah melanggar perizinan;
- c. dilakukan pelaporan terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim WASDAL atas bangunan-bangunan yang telah direkomendasi Komisi A (antara lain Tower di Kecamatan Tapos, Bangunan SPBU di bidang tanah yang tidak sesuai) untuk kemudian dilakukan pelimpahan terhadap SATPOLPP;
- d. dilakukan pengawasan dan ditempuh langkah-langkah administratif terhadap toko modern yang tidak memiliki SLF (sertifikat laik fungsi);
- e. dilakukan komunikasi intensif dengan Kecamatan dalam melakukan pendataan bangunan dan tempat usaha yang berada di tingkat Kelurahan se-Kota Depok.

5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

- a. dilakukan komunikasi intensif antara Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- b. dilakukan optimalisasi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian;
- c. penyediaan anggaran terhadap LINMAS dapat diperhatikan dengan seksama, mengingat besarnya peran LINMAS dalam masyarakat;
- d. dilakukan optimalisasi penertiban terhadap Garis Sempadan;
- e. meningkatkan pengawasan terkait peredaran obat-obat terlarang;
- f. dilakukan penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP;

- g. dilakukan pemenuhan kelengkapan kendaraan operasional patroli baik berupa peralatan dan perlengkapan pendukungnya;
- h. dilakukan penambahan anggaran dalam mendukung tugas Satpol PP Tahun Anggaran 2023;
- i. dilakukan penambahan operasional Tim Terpadu Trantibum dan pendukung operasional aktivitas lapangan;
- j. dilakukan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP berupa pelatihan dan tambahan vitamin serta 4 (empat) Pelatihan Beladiri (Tarung Drajad, karate, silat dan militer).

6. Badan Keuangan Daerah Kota Depok

- a. dilakukan kemudahan dalam pengurusan balik nama SPPT yang terhadap wajib pajak yang menempuh sertifikasi tanah melalui program PTSL;
- b. dilakukan inventarisir terkait aset -aset yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor;

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

- a. dilakukan penambahan terhadap *command centre*;
- b. Fasilitasi terhadap wifii gratis untuk setiap RW di Kota Depok;
- c. penguatan terhadap data center;
- d. aksesibilitas jaringan internet di setiap RW dapat dilakukan perawatan dan dapat dioptimalkan;
- e. dilakukan pendataan terkait lokasi di Kota Depok yang telah memperoleh akses internet gratis.

8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

- a. dibuatkan kriteria penerima bantuan taman baca di setiap wilayah;
- b. dilakukan inovasi guna mendorong peningkatan minat baca masyarakat di Kota Depok;
- c. percepatan pelaksanaan pemindahan arsip dari Kabupaten Bogor ke Kota Depok segera dilaksanakan secara komprehensif;
- d. pendataan jumlah dan lokasi perpustakaan di Kota Depok.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

- a. dilakukan sinkronisasi terhadap data kependudukan dengan hasil pengecekan data faktual yang dimiliki KPU;
- b. dilakukan *recheking* terhadap data kependudukan yang statusnya meninggal dunia;
- c. dilakukan optimalisasi pendataan penduduk khususnya terhadap pemilih pemula;
- d. dilakukan evaluasi terhadap Nomor Induk Kependudukan yang tidak terdata dalam Kartu Keluarga;
- e. dilakukan fasilitasi pelayanan terhadap warga yang tidak terbiasa berinteraksi secara digital.

10. Kecamatan se- Kota Depok

- a. dibentuk Perpustakaan atau Kelompok belajar di tingkat Kecamatan dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan warga Kota Depok dan peningkatan budaya literasi bagi anak-anak;
- b. dilakukan peningkatan program pengawasan dan pengendalian bangunan gedung yang berada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Wr,Wb

Depok, 15 Juni 2023

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

H. Hamzah, S.E., M.M.

Mad Arif

Abdul Hamid , S.Ag

